

**ANALISIS *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN  
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN  
WONOSOBO**

***Stakeholders Analysis in the Development of A Strategic Tourism  
Area in Wonosobo Regency***

**Zam Zam Masrurun<sup>1\*</sup>, Dyah Meutia Nastiti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Tourism and Rural Development

<sup>2</sup>Urban and Regional Planning

Shirvano Consulting

Blunyah Rejo TR II No. 805, Jetis, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta 55241

Indonesia

zamzamasrurun@gmail.com

Diterima: 18 Juli 2022. Disetujui: 20 Januari 2023. Dipublikasikan: 12 Juni 2023

**Abstrak**

Dalam upaya pengelolaan destinasi pariwisata, *stakeholders* merupakan salah satu unsur penting dalam mempertahankan daya saing. Hal ini merupakan faktor utama untuk bertahan dalam dinamika dan perkembangan pasar pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mendeskripsikan hubungan antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan kawasan strategis pariwisata pada Kabupaten Wonosobo. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis *stakeholders*. Jumlah sampel yang diteliti adalah empat puluh delapan *stakeholders* dengan teknik penentuan sampel secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua puluh delapan *stakeholders* yang berkepentingan erat dengan pembangunan kawasan. Terdapat tiga *key player* atau *stakeholders* dengan peranan dan keterlibatan paling penting pada Kawasan; dua pemangku kepentingan, diantaranya merupakan kelompok *subject*; lima *stakeholders* termasuk dalam *context setter*; serta delapan belas lainnya adalah kelompok *crowd*. Selain itu, hasil penelitian mengungkap lima skema model dan hubungan antarpemangku kepentingan baik dari kelompok pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Keberhasilan pembangunan kawasan strategis pariwisata pada Kabupaten Wonosobo sangat ditentukan oleh efektivitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingannya sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas antarlembaga dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antarinstansi/lembaga.

**Kata Kunci:** aspek manajemen, kawasan strategis pariwisata, *stakeholders*

## Abstract

*Stakeholders are one of the essential elements in maintaining competitiveness in efforts to manage tourism destinations. They are the main factor in the dynamics and development of the current tourism market. This study aimed to identify, classify, and describe the relationship between the stakeholders involved in the development of the Tourism Strategic Area in Wonosobo Regency. Data and information through field observations, in-depth interviews, and literature studies. The analysis technique in this study used a stakeholder mapping method approach. The sample in this study was forty-eight stakeholders determined based on the purposive sampling technique. The study result is an indication that twenty-eight stakeholders had a high interest in the development of the area. There were three key players or stakeholders with the most crucial roles and involvement in the area, i.e., two stakeholders in subject groups, five stakeholders in the context setters, and eighteen others in crowd groups. In addition, the research revealed five model schemes and relationships between stakeholders from government, private, and community groups. The success of the development of the Tourism Strategic Area in Wonosobo Regency determines the effectiveness and collaboration between the stakeholders. So, therefore, it would require commitment and synergy between institutions in conducting communication, coordination, and cooperation between agencies/institutions.*

**Keywords:** *management aspect, stakeholders, tourism-strategic area*

©2023 Direktorat Kajian Strategis

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus tumbuh dan diperhitungkan di provinsi Jawa Tengah. Dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan provinsi Jawa Tengah pada triwulan I 2019 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,14% (*year of year*), lebih tinggi dari level nasional yang tercatat sebesar 5,07% (*year of year*) (Bank Indonesia, 2019). Data kunjungan wisatawan nusantara ke Jawa Tengah sebanyak 29.852.095 perjalanan pada tahun 2014, 33.030.843 perjalanan pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga 48.943.607 perjalanan pada tahun 2018. Pada sisi lain, kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah tercatat sebanyak 419.584 perjalanan pada tahun 2014, 421.191 perjalanan pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga 677.168 perjalanan pada tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan berbagai potensi besar pengembangan pariwisata serta memiliki beberapa bagian wilayah yang termasuk dalam salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pemerintah Kabupaten Wonosobo turut merespon dan mendorong berbagai destinasi wisata untuk berkembang. Melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) mengenai Pembangunan Destinasi Pariwisata, obyek daya tarik wisata di

Kabupaten Wonosobo dikelompokkan menjadi Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) yang di dalamnya terbagi atas kawasan-kawasan strategis pariwisata, yakni Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dengan tujuan pengembangan dan pengelolaan yang lebih terarah.

Salah satu KSPK yang paling awal direncanakan untuk dikembangkan pemerintah daerah kabupaten Wonosobo adalah KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya. KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya ini merupakan bagian dari DPK Dieng dan sekitarnya yang merupakan magnet bagi tujuan wisata Dataran Tinggi Dieng. Banyaknya *stakeholders* yang ada pada kawasan ini, baik tingkat masyarakat lokal, antarpemerintah daerah, maupun pemerintah pusat merupakan tantangan terbesar pengembangan pariwisata.

Sebagai bagian dari kawasan dataran tinggi Dieng, pengembangan KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya menjadi penting dalam mendukung pembangunan pariwisata di zona inti pariwisata kawasan dataran tinggi Dieng (KSPN Dieng dan sekitarnya). Pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten di Kejajar–Garung dan sekitarnya tidak cukup hanya dengan memetakan potensi dan menawarkan obyek daya tarik wisata yang ada. Banyaknya *stakeholders* yang ada menjadikan pengelolaan KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya menjadi suatu usaha yang kompleks.

Beberapa kajian memperlihatkan, masing-masing *stakeholders* pada Kawasan belum sinergis sehingga benturan konflik kepentingan menjadi kendala yang sering dihadapi (Nurlaila, 2014; Setyawan, 2012; Wahyudi, 2010). Peranan *stakeholders* dalam upaya pengelolaan destinasi pariwisata merupakan salah satu unsur penting demi mempertahankan daya saing dan merupakan faktor utama untuk bertahan dalam dinamika dan perkembangan pasar pariwisata saat ini. Destinasi yang mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya akan cenderung ke arah praktik inovatif dalam strategi kompetitif serta menarik kunjungan wisatawan (Fernando, 2015; Zainuddin et al., 2016).

*Stakeholders* merupakan aktor-aktor kunci yang dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. *Stakeholders* ini dapat berupa organisasi, komunitas, kelompok sosial ekonomi, pemerintah, atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat sehingga sangat dimungkinkan terjadinya benturan konflik kepentingan antar *stakeholders*. Selain itu, *stakeholders* memiliki berbagai tantangan serta kemungkinan untuk terjadinya disfungsi peran. Disfungsi peran tersebut tentunya akan membawa dampak negatif yang dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi antarpemangku kepentingan (Iqbal, 2007; Kusumatantya, 2013; Race & Millar, 2008).

Oleh sebab itu, diperlukan tinjauan khusus mengenai *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan pada pengembangan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) siapa saja pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan pada pengembangan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya, dan (2) bagaimana pengaruh dan kepentingan dari para aktor yang ada, serta (3) bagaimana hubungan antar *stakeholders* pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya sesuai dengan peran dan fungsi yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan serta menggambarkan hubungan antar *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.

## METODE

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada pada Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kejajar–Garung dan sekitarnya, kawasan ini merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng yang secara administratif terletak di Kecamatan Kejajar dan Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kawasan ini merupakan bagian dari dataran tinggi Dieng yang memiliki daya tarik wisata cukup beragam. Kawasan ini merupakan jalur utama pariwisata dataran tinggi Dieng yang relatif baik kondisinya, serta merupakan pintu gerbang pariwisata dataran tinggi Dieng dari arah Borobudur, Yogyakarta, Semarang, dan sekitarnya. Amenitas atau sarana-prasarana pariwisata, seperti usaha *homestay*, usaha warung makan, serta sarana usaha penunjang pariwisata lainnya relatif sudah tersedia. Pada kawasan ini terdapat pengelolaan pariwisata yang dijalankan pemerintah kabupaten ataupun oleh masyarakat setempat melalui Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis (DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019; Kartiningsih, 2005).

### Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2017). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah empat puluh delapan *stakeholders* yang ditentukan secara *purposive*.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif adalah jenis data yang berasal bukan dari angka-angka dan terdiri atas deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2017). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka berupa dokumen yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode analisis pemangku kepentingan. Metode ini menurut Reed et al. (2009), meliputi tahapan:

1. Identifikasi *stakeholders*, dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya;
2. Klasifikasi *stakeholders*, dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap pengembangan KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya;

3. Hubungan antar*stakeholders*, dipetakan berdasarkan dokumen dan hasil wawancara dengan informan kunci. Pemetaan ini merupakan gambaran dari hubungan antar*stakeholders*, baik yang tertulis di dalam dokumen (tugas pokok dan fungsi) maupun yang terlaksana di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi *Stakeholders*

Berdasarkan hasil identifikasi pemangku kepentingan, diperoleh dua puluh delapan *stakeholders* yang terlibat atau memiliki kepentingan dalam pariwisata di kawasan strategis pariwisata kabupaten Keajar–Garung dan sekitarnya. Keberhasilan dalam organisasi pariwisata, baik publik maupun swasta, dapat disebabkan oleh organisasi yang dapat menjamin kepuasan *stakeholders* yang menyangkut semua pihak dengan pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda (Damanik, 2013). Ini dapat terbentuk melalui kemitraan antarpemangku kepentingan serta hasil dari kebijakan yang efisien (Kort et al., 2016).

Keberhasilan suatu destinasi pariwisata ditentukan dari efektivitas dan kemitraan antarpemangku kepentingannya. Penelitian telah menemukan bahwa terdapat tingkat kompleksitas dan tantangan yang tinggi dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam pariwisata, terlebih dalam proses perencanaan pengembangan (Hatipoglu et al., 2016; Lemmetyinen & Go, 2005; Ruhanen, 2009). Selain itu, kemitraan antarpemangku kepentingan sangat penting untuk memberi manfaat jangka panjang bagi destinasi. Banyak pembuat kebijakan dan praktisi yang perlu terlibat erat di bidang kepariwisataan, mengingat pentingnya daya saing destinasi terhadap pengembangan destinasi (Shariffuddin et al., 2020).

**Tabel 1.** Identifikasi *Stakeholders* KSPK Keajar–Garung dan sekitarnya

Tingkatan	Pemangku Kepentingan	Peran Normatif	Peran <i>Eksisting</i>	Sumber Daya
Nasional	1. Kementerian Pariwisata	a. Pembuatan kebijakan b. Penetapan kawasan strategis pariwisata nasional	Menetapkan kawasan strategis pariwisata nasional Dieng	Kebijakan
	2. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)	a. Penyidikan benda cagar budaya b. Pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya c. Perlindungan dan pemugaran benda cagar budaya	a. Memiliki situs cagar budaya b. Perlindungan dan pemugaran cagar budaya	a. Kebijakan b. Situs cagar budaya
	3. Perusahaan (Perhutani, BI, PLN, Tirta)	a. Pendanaan CSR b. Pendampingan program c. Pemilik lahan	a. Pendanaan di Kecamatan Keajar dan Garung b. Mengelola dan	a. Lahan b. Kewenangan c. Anggaran

Tingkatan	Pemangku Kepentingan	Peran Normatif	Peran <i>Eksisting</i>	Sumber Daya
	Investama, Geodipa, Indonesia Power, PTPN XII – Tambi)		memberikan perizinan pemanfaatan pada LMDH selaku mitra Perhutani dalam mengelola destinasi c. Mendapatkan pemasukan bagi hasil pendapatan sebagai pemilik kawasan/ hutan	
Provinsi	4. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah	a. Pembuat kebijakan b. Pembuat perencanaan KSPN Dieng	a. Membuat detail perencanaan KSPN Dieng dan Sekitarnya b. Membuat kebijakan tiket terusan Kawasan dataran tinggi Dieng tahun 2010	Kebijakan
	5. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)	a. Pemilik kawasan objek wisata Telaga Warna & Pengilon b. Pembina dan pengawas pihak ketiga (perusahaan) dalam perusahaan wisata termasuk <i>ticketing</i> c. Kewajiban BKSDA: menyeter PNPB ke pusat sehingga TWTP harus ditarik tiket sebesar 2.000 (harga lama) c. Mengelola Telaga Warna melalui pihak ketiga sesuai amanat PP 12 Tahun 2014	a. Memiliki objek wisata TWTP. b. Membina dan mengawasi pihak ketiga (PT AIBL) dalam perusahaan wisata TWTP sesuai amanat PP 12 tahun 2014 ( <i>ticketing</i> ).	a. Lahan, kawasan b. Kewenangan (untuk pengelolaan lahan konservasi tersebut)
	6. PT. Alam Indah Bonbin Lestari (AIBL)	Pengelola kawasan wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon	Mengelola kawasan wisata Telaga Warna dan Telaga Pengilon	a. Investasi/ pendanaan b. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kabupaten	7. Sekretariat Daerah	Pengkoordinasian perumusan kebijakan	Koordinasi perencanaan desa wisata lintas OPD	Kebijakan

Tingkatan	Pemangku Kepentingan	Peran Normatif	Peran Eksisting	Sumber Daya
	Kabupaten Wonosobo			
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo (Bappeda)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuat kebijakan</li> <li>b. Menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten</li> <li>c. Pengawal perencanaan pariwisata dari Disparbud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kawasan strategis pariwisata kabupaten.</li> <li>b. Mengawal perencanaan pariwisata dari Disparbud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan, kebijakan</li> <li>b. Kajian</li> </ul>
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuat kebijakan destinasi pariwisata</li> <li>b. Pembuat perencanaan KSPK</li> <li>c. Pelaksana pengelolaan objek daya tarik, pajak, dan retribusi untuk penerimaan pendapatan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan destinasi wisata Dieng Plateau Teater, Telaga Menjer.</li> <li>b. Mengelola dan/atau Penarikan <i>ticketing</i> mulai dari Tol Garung, Dieng, dan objek wisata.</li> <li>c. Membuat perencanaan KSPK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan destinasi pariwisata (atraksi dan amenitas)</li> <li>b. Pengelolaan kelembagaan pariwisata</li> <li>c. Pemasaran produk pariwisata</li> <li>d. Pengelolaan aset pariwisata</li> </ul>
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana teknis</li> <li>b. Pembuat kebijakan</li> </ul>	Pembangunan jalur alternatif Jalan Rakai Panangkaran dan Kreo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan</li> <li>b. Kewenangan (terkait pembangunan jalan dan sarpras)</li> </ul>
11.	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Dispartan) Kabupaten Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksana teknis</li> <li>b. Pembuat kebijakan</li> </ul>	Sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan terkait pertanian</li> <li>b. Kewenangan (terkait pengelolaan pertanian di kawasan Keajar-Garung)</li> </ul>
12.	Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuat kebijakan</li> <li>b. Pelaksana teknis</li> </ul>	Menyusun kebijakan kebersihan, penanganan sampah dan limbah B3, serta kehutanan di kawasan pariwisata Kecamatan Keajar dan Garung.	Peraturan

Tingkatan	Pemangku Kepentingan	Peran Normatif	Peran Eksisting	Sumber Daya
13.	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kabupaten Wonosobo	a. Pelaksana teknis b. Pembuat kebijakan	Sosialisasi dan pelatihan pelaku usaha pariwisata (UMKM produk lokal Kejajar-Garung)	a. Peraturan b. Kewenangan (terkait pengembangan UMKM)
14.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhu) Kabupaten Wonosobo	a. Pembuat kebijakan b. Pelaksana teknis (sosialisasi keselamatan berlalu-lintas dsb)	Pemasangan dan peringatan plang larangan/tanda bahaya jalur alternatif Jalan Rakai Panangkaran	a. Peraturan b. Kewenangan (terkait pengembangan <i>shuttle</i> dan moda transportasi)
15.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospmd) Kabupaten Wonosobo	a. Pelaksana teknis b. Pembuat kebijakan	Penerapan program inovasi desa	a. Peraturan b. Kewenangan (terkait pembangunan desa/program inovasi desa)
16.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wonosobo	a. Pembuat kebijakan b. Pelaksana teknis (edukasi, mitigasi)	Pemberian peringatan titik rawan bencana dan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat.	Kebijakan
17.	Forum Komunikasi (FK) Pokdarwis Wonosobo	a. Koordinator Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Wonosobo b. Membantu Disparbud Wonosobo melakukan penguatan kelembagaan pariwisata di masyarakat melalui konsep pengembangan desa wisata.	Menyusun dan melaksanakan pengembangan pariwisata jangka panjang dan jangka pendek bersama dinas terkait melalui forum diskusi rutin bulanan.	a. SDM b. Jaringan ke dinas terkait
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)	a. Pembuat kebijakan b. Mengelola dan/atau menarik <i>ticketing</i> objek	a. Mengelola dan/atau menarik <i>ticketing</i> objek wisata pada wilayah administrasi Kab.	a. Peraturan/kebijakan b. Kewenangan

Tingkatan	Pemangku Kepentingan	Peran Normatif	Peran Eksisting	Sumber Daya
	Kabupaten Banjarnegara	Wisata pada wilayah administrasi Kab. Banjarnegara	Banjarnegara. b. Mengembangkan pariwisata berdasarkan pada RIPARDA Kab. Banjarnegara.	
Lainnya	19. Lembaga Swadaya Masyarakat (APPEL, Pammbos, Koling, dll)	Wadah organisasi untuk menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat	Upaya menggerakkan dan melaksanakan aspirasi masyarakat	a. SDM b. Jaringan ke dinas terkait
	20. Pemerintahan Kecamatan	a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan c. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum	-	-
	21. Penyedia Fasilitas Kesehatan	Menyediakan layanan dan fasilitas kesehatan	Layanan kesehatan masyarakat Kejajar--Garung	Fasilitas kesehatan
	22. Pemerintahan Desa	a. Menyelenggarakan pemerintahan desa b. Membina masyarakat dan perekonomian desa	a. Pengelolaan desa b. Pengelolaan kelembagaan objek wisata	a. Pendanaan (dana desa) b. SDM
	23. Pokdarwis / BUMDes / LMDH (Wonosobo)	a. Pengelola, mengembangkan dan mendapatkan manfaat dari industri pariwisata di kawasan Kejajar b. Pengelolaan objek daya tarik wisata untuk penerimaan desa, pengelola dan/atau Mitra (Seperti : Perhutani sebagai pemilik kawasan/hutan)	a. Mengelola, mengembangkan dan mendapatkan manfaat dari industri pariwisata di Kecamatan Kejajar. b. Mengelola objek daya tarik wisata sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku.	SDM

Tingkatan	Pemangku Kepentingan	Peran Normatif	Peran <i>Eksisting</i>	Sumber Daya
	24. Pokdarwis Dieng Pandhawa (Banjarnegar a)	Pengelola & pendorong pengembangan industri pariwisata di kawasan Dieng	a. Mengelola, mengembangkan dan mendapatkan manfaat dari industri pariwisata di kawasan Dieng. c. Mengelola objek daya tarik wisata sesuai peraturan dan kebijakan yang berlaku.	SDM
	25. Lembaga Pendidikan / Universitas / Pusat Studi	Melakukan penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat	a. Kajian Penelitian b. Program pengabdian masyarakat	a. SDM b. pendanaan
	26. Biro Wisata, Pengusaha Amenitas dan DTW swasta di Kecamatan Kejaran dan Garung, Wonosobo	Mengelola usaha bidang pariwisata dan memberikan layanan kepada wisatawan	a. Pengelola usaha bidang pariwisata b. Ujung tombak layanan wisatawan	a. SDM b. Investasi / pendanaan usaha
	27. Himpunan Pramuwisata Indonesia / (HPI) Kabupaten Wonosobo	Wadah tunggal pramuwisata untuk pembinaan dan berkomunikasi antarpramuwisata, maupun dengan pemerintah atau swasta	Peningkatan kapasitas pramuwisata	SDM
	28. Media cetak dan elektronik (Genpi, Wonosobo, dan lain sebagainya)	Sebagai pusat informasi / penyedia dan penyampai informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas dan banyak hal lain yang terjadi di tengah masyarakat.	Pengarusutamaan informasi kepariwisataan ( <i>branding</i> , promosi, ulasan wisata)	SDM

Sumber: Hasil observasi, 2020; BPCB Jawa Tengah, 2015; Permen LKH No. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, 2016; PP No. 50 Tahun 2011, 2011; Perbup Kab. Wonosobo No. 6 Tahun 2018, 2018; Perda Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2012, 2012

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa *stakeholders* pariwisata di KSPK Kejaran–Garung dan sekitarnya terdiri atas lembaga tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, hingga lainnya, seperti pengusaha bidang pariwisata, akademisi, dan media dengan berbagai kepentingan, baik pada kategori pemerintah, masyarakat atau *civil society organization*, maupun swasta melalui pengelolaan destinasi maupun dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Berdasarkan identifikasi di atas, klasifikasi pemangku kepentingan kemudian dirumuskan melalui analisis keterlibatan pemangku kepentingan. Analisis ini didapat melalui hasil identifikasi pada tabel di atas berdasarkan wawancara mendalam kepada para pemangku kepentingan serta observasi lapangan dan studi Pustaka; hasilnya diklasifikasikan ke dalam: (1) formasi penerbitan atau penetapan kebijakan, (2) pemberian dukungan pendanaan, (3) pelaksanaan penelitian, (4) fasilitasi berupa teknologi atau pelatihan, dan (5) pelaksanaan konservasi serta pemeliharaan infrastruktur pariwisata. Penomoran pada tabel 2 berikut merujuk pada tabel 1 yang sudah diurutkan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya.

**Tabel 2.** Identifikasi *Stakeholders* KSPK Keajar–Garung dan Sekitarnya

Pemangku Kepentingan	Kebijakan	Dukungan	Penelitian	Fasilitasi	Konservasi /
	Pariwisata	Pendanaan	/Advokasi	Teknologi /Pelatihan	Pemeliharaan Infrastruktur
	Pengaruh			Kepentingan	
Disparbud (9)	vv	vv	vv	vv	vv
Disporapar Jateng (4)	vv	vv	v	v	v
BAPPEDA (8)	vv	v	vv	-	v
Kemenpar (1)	vv	v	v	v	-
BKSDA Jateng (5)	vv	-	-	-	vv
Pokdarwis (17)	v	v	v	-	vv
BPCB (2)	v	v	-	-	vv
Perusahaan (Perhutani, BI, PLN, Tirta Investama, Geodipa, Indonesia Power, PTPN XII – Tambi) (3)	-	v	v	v	v
DPUPR (10)	-	v	-	-	vv
Lembaga Pendidikan (25)	-	-	vv	v	-
Disperkimhub (14)	v	-	-	-	v
PT AIBL (6)	-	v	-	-	v
Disperindagkop (13)	-	v	-	v	-
Pemerintah Desa (22)	-	v	-	-	v
Sekretariat Daerah (7)	v	-	-	-	-
LSM (19)	-	-	v	v	-
Dinsospmd (15)	-	-	-	v	-
Dispapertan (11)	-	-	-	v	-
DLH (12)	-	-	-	-	v
BPBD (16)	-	-	-	v	-
HPI (27)	-	-	-	v	-
Pemerintah Kecamatan (20)	-	-	-	-	-
Disparbud Banjarnegara (18)	-	-	-	-	-
Pokdarwis Dieng Pandhawa (24)	-	-	-	-	-
Pengusaha Pariwisata (26)	-	-	-	-	-
Media (28)	-	-	-	-	-

Pemangku Kepentingan	Kebijakan	Dukungan	Penelitian	Fasilitasi	Konservasi /
	Pariwisata	Pendanaan	/Advokasi	Teknologi /Pelatihan	Pemeliharaan Infrastruktur
	Pengaruh			Kepentingan	
Penyedia Fasilitas Kesehatan (21)	-	-	-	-	-
Paguyuban Pengemudi Bus	-	-	-	-	-

**KETERLIBATAN**

vv : sangat terlibat	 : keterlibatan tinggi
v : sedikit terlibat	 : keterlibatan sedang
- : tidak terlibat	 : keterlibatan rendah
	 : tidak terlibat

Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel 2 terlihat peran *stakeholders* pada pariwisata KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya. Yang sangat intensif terlibat adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo. Disamping itu, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Provinsi Jawa Tengah, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pariwisata, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonosobo, dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Menurut Shariffuddin et al. (2020), keberhasilan suatu destinasi pariwisata akan sangat ditentukan dari efektifitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingannya. Berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang ada, para pemangku kepentingan kawasan perlu komitmen yang lebih kuat dalam upaya pembangunan kawasan. Hal ini dikarenakan secara formal, birokratis, dan prosedural, Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo berada pada posisi yang tidak strategis dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antarinstansi/lembaga di atasnya, seperti Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Keterlibatan lembaga-lembaga ini berperan penting untuk memberi formulasi kebijakan, mendukung pendanaan, melakukan penelitian/advokasi, dan memfasilitasi teknologi/pelatihan, serta menjalankan konservasi serta pemeliharaan infrastruktur.

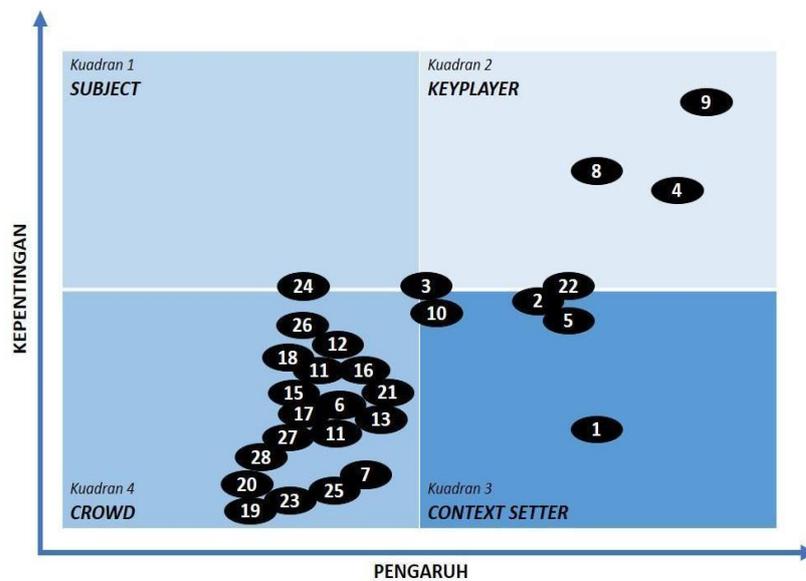
Pada tingkat kabupaten, yang memiliki keterlibatan tinggi ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada level komunitas, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) memiliki peran strategis. Kelompok ini bertanggung jawab dalam upaya peningkatan sadar wisata bagi masyarakat pada destinasi wisata sekaligus menjadi pihak, yang secara struktural ataupun nonstruktural dengan lembaga lainnya dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama.

#### Klasifikasi *Stakeholders*

Klasifikasi *stakeholders* dilakukan dengan penafsiran matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders* terhadap pengembangan KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya; Klasifikasi dijabarkan sesuai dengan matriks kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan Sekitarnya. Kategorisasi *stakeholders* menurut Bryson (2016) dapat dibagi menjadi:

1. *Key player*, yaitu aktor yang paling aktif dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan *stakeholders*, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan sistem pariwisata.
2. *Subject*, yaitu aktor yang memiliki kepentingan yang besar tetapi pengaruhnya kecil. Hal tersebut dikarenakan *stakeholders* ini memiliki kapasitas yang kecil untuk mengubah keadaan karena tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pemanfaatan sistem pariwisata secara menyeluruh. Aktor ini dapat memiliki pengaruh yang lebih besar jika bekerjasama dengan *stakeholders* lain.
3. *Context setter*, yaitu aktor yang memberikan pengaruh yang besar tetapi kepentingannya kecil.
4. *Crowd*, yaitu aktor dengan kepentingan dan pengaruh yang kecil.

Dalam penelitian ini, klasifikasi *stakeholders* KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya tampak seperti pada gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kategorisasi *Stakeholders* KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya  
 Sumber: Peneliti, 2020

### *Keyplayer*

Berdasarkan analisis kategorisasi di atas diketahui terdapat tiga *stakeholders* kunci atau *keyplayer* (kuadran 2) dalam pembangunan pariwisata KSPK Kejajar–Garung, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo.

PenelitianRaharjana et al. (2019) mengenai analisis pemangku kepentingan destinasi pariwisata Dieng Plateau, dengan batas wilayah penelitian yang lebih luas, yakni kawasan dataran tinggi Dieng secara keseluruhan (lintas batas administrasi wilayah/daerah) menyebutkan bahwa dalam konteks Dieng Plateau, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, c.q. Dirjen Kebudayaan juga merupakan salah satu *key player*. Hal ini dapat

dipahami dikarenakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki kepentingan tinggi terhadap kawasan percandian Dieng yang secara administratif berada di Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian yang mengkaji kelembagaan dari sisi Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, serta Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo merupakan aktor dengan pengaruh yang tinggi dalam pariwisata karena memiliki kewenangan untuk memutuskan kebijakan pariwisata yang mengakomodasi seluruh kepentingan dari aktor dalam pengembangan pariwisata. Dalam merancang kebijakan pembangunan pariwisata, ketiga aktor tersebut mengambil pertimbangan dari Pokdarwis sebagai aktor dengan kepentingan pariwisata tinggi, pelaku pengelolaan, dan pemanfaatan pariwisata secara langsung.

### *Subject*

Berdasarkan hasil kategorisasi, terdapat dua *stakeholders* yang masuk ke dalam kuadran *subject* (kuadran I) yaitu Pokdarwis Dieng Pandhawa dan perusahaan. Kelompok ini memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruhnya rendah dalam pengembangan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.

Perusahaan-perusahaan di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya seperti BI, PLN, Tirta Investama, PT Geodipa, Indonesia Power, dan PTPN XII – Tambi merupakan aktor dalam pembangunan pariwisata melalui pengaruh dan kepentingannya dalam memberikan dukungan dana bagi desa-desa di sekitar perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR). Perusahaan-perusahaan ini juga memiliki keterlibatan pada kegiatan penelitian/advokasi, fasilitasi teknologi/pelatihan dan konservasi/pemeliharaan infrastruktur.

Sementara itu, Pokdarwis Dieng Pandhawa memiliki kepentingan tinggi dikarenakan secara daya tarik wisata di dataran tinggi Dieng wilayah ini merupakan satu kesatuan pola atau rute perjalanan wisatawan kawasan. Jika ditinjau dari penelitian terdahulu mengenai pola perjalanan wisatawan, jalur wisata yang menjadi pilihan wisatawan adalah melalui kawasan ini, yakni akses dari Kabupaten Wonosobo (Masrurun & Nastiti, 2021). Akan tetapi, pengaruh Pokdarwis Dieng Pandhawa rendah dalam koordinasi pengelolaan dan pengembangan kawasan. Selain itu, Pokdarwis Dieng Pandhawa secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Banjarnegara sehingga memerlukan kerjasama dengan dukungan pemangku kepentingan antardaerah.

Penelitian Raharjana et al. (2019) menyebutkan bahwa dalam konteks Dieng Plateau kelompok *subject* merupakan Kementerian ESDM, dalam hal ini melalui kantor PVMBG berlokasi di desa Karangtengah, Kec. Batur Banjarnegara. Pusat Studi Pariwisata UGM, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD). Pihak swasta yang masuk kuadran *subjects* adalah pelaku usaha wisata mencakup masyarakat Dieng yang bergerak di bidang usaha *homestay*, warung makan, pelaku kuliner, serta pengusaha kolam air panas dan pengusaha wisata alam yang bermitra dengan BKSDA mengelola wisata alam Telaga Warna. Temuan tersebut menunjukkan adanya *inequal* kolaboratif pada lembaga-lembaga yang ada meskipun terdapat kolaborasi yang menarik bersifat *informal-equal* kolaboratif yang terjalin oleh pengusaha objek wisata dengan BKSDA.

### *Context setter*

Berdasarkan analisis kategorisasi hasil pemetaan tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan, didapatkan *stakeholders* dengan kategori *context setter* (kuadran III), yaitu Kementerian Pariwisata pada tingkat Pemerintah Pusat, BKSDA Jawa Tengah dan BPCB Jawa Tengah pada tingkat Pemerintah Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tingkat Kabupaten. Semua lembaga ini memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan atau keterlibatannya rendah dalam pariwisata KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.

Kementerian Pariwisata memiliki pengaruh dalam kebijakan pariwisata nasional yang berkaitan dengan KSPN Dieng dan sekitarnya. Selain itu, BKSDA Jateng dan BPCB Jateng memiliki kepentingan pada pelestarian sumber daya alam maupun sumber daya budaya pada beberapa titik di kawasan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kepentingan dalam pengembangan infrastruktur kawasan.

Apabila disandingkan dengan hasil penelitian Raharjana et al. (2019), dalam konteks Dieng Plateau, *context setter* terdapat Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk level pusat, di level provinsi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata, dan level kabupaten terdiri Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan segi tipe atau jenis kelembagaan tersebut, temuan pada kelompok ini tergolong cukup mirip. Dicontohkan pula pada penelitian tersebut bahwa pengaruh *context setter*, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, pada *event Dieng Culture Festival* yang digagas Pokdarwis Dieng Pandhawa mendapat apresiasi dan menjadi festival yang difasilitasi hingga berkembang secara baik. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki pengaruh yang tinggi dan perlu didorong untuk terus meningkatkan keterlibatan satu sama lain.

### *Crowd*

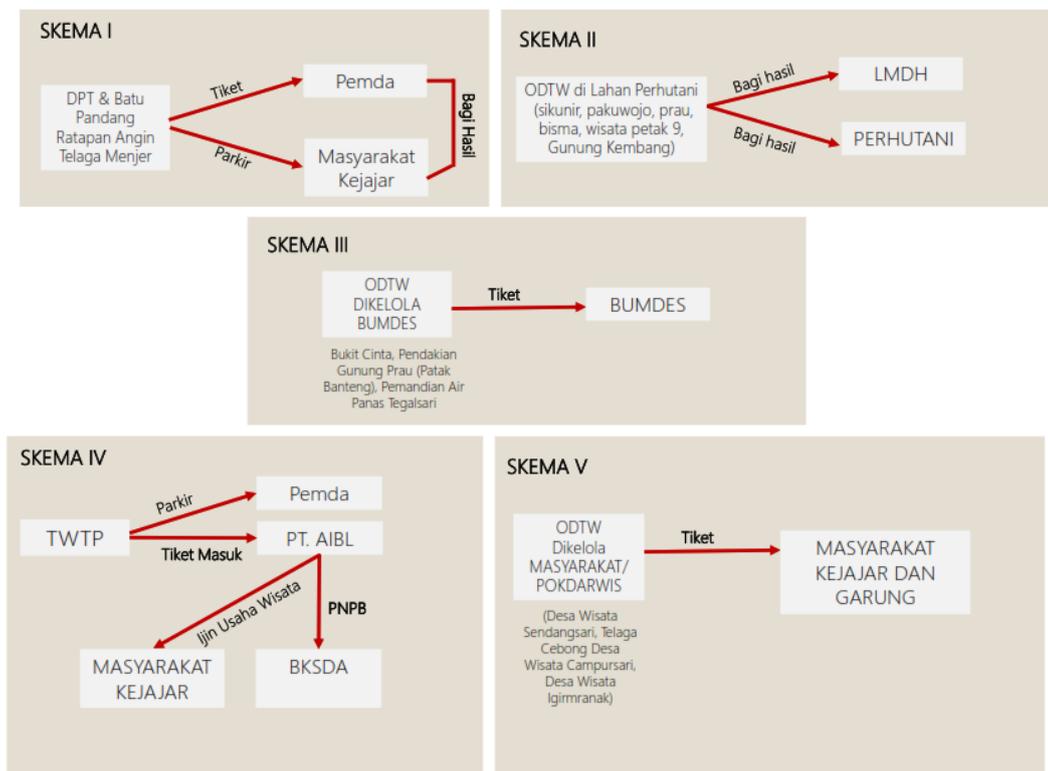
*Stakeholders* dengan peran sebagai *crowd* (kuadran IV) ialah yang memiliki sedikit kepentingan dan sedikit pengaruh terhadap hasil yang diinginkan, baik dalam pengaruh kebijakan pariwisata, dukungan pendanaan, kepentingan dalam penelitian/advokasi, fasilitasi teknologi/pelatihan, maupun konservasi/pemeliharaan infrastruktur. Pihak-pihak tersebut ialah Pemerintah Kecamatan, Dispaperkan Wonosobo, DLH Wonosobo, BPBD Wonosobo, PT AIBL, Disperindagkop Wonosobo, Dinsospmd Wonosobo, Disparbud Banjarnegara, Pengusaha Pariwisata, Media, Lembaga Pendidikan, LSM, Penyedia Fasilitas Kesehatan, dan paguyuban pengemudi bus.

Penelitian Raharjana et al. (2019) menyebutkan bahwa kelompok *crowd* pada analisis pemangku kepentingan destinasi pariwisata Dieng Plateau terdapat Kementerian BUMN, Dinas Peternakan, BPBD, FEDEP, lembaga perbankan, kecamatan, LSM, LMDH, kelompok tani, penghayat, puskesmas, tanker, dan media. Meskipun masing-masing *stakeholder* dalam kelompok ini memberikan kepentingan dan pengaruh yang belum optimal dalam proses pengelolaan, lembaga-lembaga ini diperlukan untuk mendukung sistem pariwisata yang berjalan di dataran tinggi Dieng, tidak terlepas juga pada KSPK Kejajar–Garung yang merupakan bagian dari Kawasan dataran tinggi Dieng.

Hubungan *Stakeholders*

Pada KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya terdapat tiga pembagian aktor, yaitu aktor dalam pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota, antara lain BKSDA, Disporapar, Disparbud Wonosobo, Bappeda Wonosobo, Sekretariat Daerah, BPBD Wonosobo, Disperkimhub, Disperindagkop, Dispapertan, Dinsospmd, DLH, dan Disparbud Banjarnegara. Aktor swasta dengan perannya sebagai pendamping program tanggung jawab sosial dan lingkungan dan lain sebagainya untuk masyarakat di Kejajar dan Garung ialah, PT Perkebunan Tambi, PT Alam Indah Bonbin Lestari (pengelola destinasi wisata), Geo Dipa Energy, dan Perum Perhutani (pemilik lahan), PLN, Bank Indonesia, dan PT Tirta Investama.

Terakhir, masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan sistem kepariwisataan adalah pokdarwis, pemilik usaha lokal, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku usaha dan paguyuban pengemudi angkutan bus. Hubungan antar*stakeholders* ini digambarkan dalam skema-skema berikut.



**Gambar 2.** Skema Hubungan *Stakeholders* KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya  
 Sumber: Peneliti, 2020

Berdasarkan gambar 2, masing-masing aktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, memiliki hubungan yang beragam. Pada skema I ditemukan kerjasama antara dua atau lebih *stakeholders* yang berperan dalam pengembangan destinasi wisata. Salah satu yang menggunakan skema tersebut adalah kelompok masyarakat yang mengelola objek daya tarik wisata Batu Ratan Angin dalam kawasan Dieng Plateau *Theater* yang

merupakan destinasi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.

Sama seperti sebelumnya, Skema II juga merupakan kerjasama bagi hasil antara masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perum Perhutani Kabupaten Wonosobo. Pada Skema III, sistem pengelolaan wisata oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) difokuskan untuk kemajuan desa melalui beberapa unit usaha di desa tersebut, termasuk pengembangan destinasi wisata, seperti di Bukit Cinta dan Bukit Seroja Menjer.

Hubungan kerja sama tidak hanya melalui bagi hasil; Terdapat Skema IV dengan sistem pengelolaan aset destinasi wisata yang dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah mengelola seluruh kawasan Telaga Warna dan Telaga Pengilon bersama dengan PT Alam Indah Bonbin Lestari (AIBL) sejak tahun 2015. Sebagai fasilitas tambahan, Disparbud Wonosobo berkoordinasi membangun kawasan parkir khusus untuk wisatawan yang akan berwisata ke Telaga Warna dan Telaga Pengilon dengan kepemilikan aset terpisah dari BKSDA Jawa Tengah dan PT Alam Indah Bonbin Lestari.

Terakhir, Skema V merupakan skema pengelolaan destinasi wisata oleh kelompok-kelompok masyarakat di Desa Sembungan dengan destinasi wisata unggulan *sunrise* Bukit Sikunir. Jumlah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata tersebut yang cukup besar.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua puluh delapan pemangku kepentingan yang terdiri atas pemerintah, baik kategori lembaga di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, masyarakat, maupun swasta melalui pengelolaan destinasi, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, hingga hak lainnya seperti pengusaha bidang pariwisata, lembaga pendidikan, dan media.

Analisis *stakeholders* menghasilkan empat klasifikasi pemangku kepentingan kawasan, meliputi (a) *key player*, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, serta Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Wonosobo, (b) *subject*, terdiri atas Pokdarwis Dieng Pandhawa dan perusahaan-perusahaan, yakni Perum Perhutani, BI, PLN, Tirta Investama, Geodipa, Indonesia Power, PTPN XII dan PT Tambi, (c) *context setter*, meliputi Kementerian Pariwisata pada tingkat Pemerintah Pusat, BKSDA Jawa Tengah dan BPCB Jawa Tengah pada tingkat Pemerintah Provinsi, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) *crowd*, meliputi pemerintah kecamatan, Dispaperkan Wonosobo, DLH Wonosobo, BPBD Wonosobo, PT AIBL, Disperindagkop Wonosobo, Dinsospmd Wonosobo, Disparbud Banjarnegara, pengusaha pariwisata, media, lembaga pendidikan, LSM, penyedia fasilitas kesehatan hingga paguyuban pengemudi bus Dieng.

Selain itu, hasil analisis menggambarkan lima skema hubungan antar *stakeholders* pada kawasan. Skema I merupakan kerjasama pengelolaan destinasi antara Pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Skema II merupakan kerjasama bagi hasil antara masyarakat dengan perusahaan dalam

pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Selain itu, terdapat skema III yang merupakan skema pengembangan dan pengelolaan pariwisata oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Terdapat pula skema IV, yakni kerjasama melalui pengelolaan aset destinasi wisata yang dilakukan oleh pihak ketiga atau swasta. Terakhir, skema V merupakan skema pengelolaan destinasi wisata oleh kelompok masyarakat.

#### Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memberikan alternatif strategi bagi pengembangan tata kelola pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya yang inovatif sehingga mampu mendorong dan menghasilkan keunggulan kompetitif pariwisata kawasan. Keberhasilan pembangunan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya akan sangat ditentukan dari efektivitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan komitmen yang kuat dan sinergi yang harmonis antarpemangku kepentingan dalam upaya pembangunan pariwisata di KSPK Kejajar–Garung dan sekitarnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Wisatawan Nusantara 2018* (Subdirektorat Statistik Pariwisata, Ed.). BPS RI.
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. (2015). *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*. [http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb Jateng/wp-content/uploads/sites/31/2018/01/RENSTRA\\_BPCB\\_JATENG\\_2015-2019.pdf](http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb Jateng/wp-content/uploads/sites/31/2018/01/RENSTRA_BPCB_JATENG_2015-2019.pdf)
- Bank Indonesia. (2019). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2019*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Documents/Laporan%20Perekonomian%20Provinsi%20Jawa%20Tengah%20Mei%202019.pdf>
- Bryson, J. M. (2016). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial* (M. Miftahuddin, Ed.; Reguler). Pustaka Pelajar.
- Damanik, J. (2013). *Pariwisata Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan*. Pustaka Pelajar.
- DPMPSTP Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Profil Potensi dan Peluang Investasi di sektor Pariwisata*.
- Fernando, I. N. (2015). What Competitive Strategies Way forward the Regional Competitiveness? A Comparative Economic Approach to Sri Lankan Tourism. *International Journal of Business and Management*, 10(4), 178–186. <https://doi.org/10.5539/IJBM.V10N4P178>
- Hatipoglu, B., Alvarez, M. D., & Ertuna, B. (2016). Barriers to Stakeholder Involvement in the Planning of Sustainable Tourism: The Case of the Thrace Region in Turkey. *Journal of Cleaner Production*, 111, 306–317. <https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2014.11.059>
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pertanian*, 26(3), 89–99.
- Kartiningsih, D. E. (2005). *Penentuan Posisi Obyek Wisata dan Prasarana Wisata Dataran Tinggi Dieng di Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Menggunakan GPS Berbasis Sistem Informasi Geografis* [Undergraduate Thesis, Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/451>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Pub. L. No. P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, Berita Negara 2016 No. 205 (2016). [http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8\\_ORGANISASI\\_DAN\\_TATA\\_KERJA\\_UPT\\_KSDA\\_.pdf](http://ksdae.menlhk.go.id/assets/news/peraturan/P.8_ORGANISASI_DAN_TATA_KERJA_UPT_KSDA_.pdf)

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pub. L. No. 50, Lembaran Negara 2011 No. 125 (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/35692/PP%2050%20Tahun%202011.pdf>
- Kort, Ir. M., Verweij, S., & Klijn, E.-H. (2016). In search for effective public-private partnerships: An assessment of the impact of organizational form and managerial strategies in urban regeneration partnerships using fsQCA. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 34(5), 777–794. <https://doi.org/10.1177/0263774X15614674>
- Kusumatantya, I. (2013). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1(1), 33–48. <https://doi.org/10.14710/JWL.1.1.33-48>
- Lemetyinen, A. I., & Go, F. M. (2005). The Challenge of Coordinating Connectedness Amongst Different Stakeholders in Dispersed Networks: The Case of Finnish Tourism Enterprises. *IMP Conference*, 1–20. <https://www.impgroup.org/uploads/papers/4718.pdf>
- Masrurun, Z. Z., & Nastiti, D. M. (2021). Pola Perjalanan Wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. *Journal of Tourism and Creativity*, 5(1), 28–35. <https://doi.org/10.19184/JTC.V5I1.22063>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurlaila. (2014). Tinjauan Terhadap Konflik Kepentingan Pada: Destinasi Wisata Dieng Plateau. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(1), 67–71.
- Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo, Pub. L. No. 6, Berita Daerah 2018 No. 6 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/241066/PERBUP%20NO.%206%20TH%202018.pdf>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Pub. L. No. 10, Lembaran Daerah 2012 No. 10 (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/222100/perda-prov-jawa-tengah-no-10-tahun-2012>
- Race, D., & Millar, J. (2008). *Social and Community Dimensions to ACIAR Projects: ACIAR Training Manual* (M. Errington, Ed.). Australian.
- Raharjana, D. T., Ahimsa-Putra, H. S., Wijono, D., & Kusworo, H. A. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan Destinasi Pariwisata Dieng Plateau Jawa Tengah. *Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 2(2). <https://doi.org/10.35729/JHP.V2I2.30>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2009.01.001>
- Ruhanen, L. (2009). Stakeholder Participation in Tourism Destination Planning Another Case of Missing the Point? *Ruhanen, Lisa*, 34(3), 283–294. <https://doi.org/10.1080/02508281.2009.11081603>
- Setyawan, A. D. (2012). Konflik Kepentingan Berkaitan Permasalahan Ekologi, Ekonomi dan Sosio-Budaya di Tanah Tinggi Dieng, Jawa Tengah, Indonesia. *Geografia: Malaysian Journal of Society and Space*, 8(4), 88–104. [http://journalarticle.ukm.my/5506/1/9a.geografia-jul\\_2012-Setyawan-uns-melayu-ed%2520kat.pdf](http://journalarticle.ukm.my/5506/1/9a.geografia-jul_2012-Setyawan-uns-melayu-ed%2520kat.pdf)
- Shariffuddin, N. S. M., Zain, W. M. A. W. M., & Azinuddin, M. (2020). Collaborative Challenges among Stakeholders on Tourism Destination Competitiveness. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 454–466. [https://www.ijicc.net/images/vol\\_13/13138\\_Shariffuddin\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/vol_13/13138_Shariffuddin_2020_E_R.pdf)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

- Wahyudi. (2010). *Kajian Kerja Sama Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng* [Master Thesis]. Universitas Diponegoro.
- Zainuddin, Z., Radzi, S. M., & Zahari, M. S. M. (2016). Perceived Destination Competitiveness of Langkawi Island, Malaysia. *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 222, 390–397. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2016.05.190>